



**SALINAN**

**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PUNGUTAN KALURAHAN BANGUNJIWO**



**SALINAN**

LURAH BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
T E N T A N G  
PUNGUTAN KALURAHAN BANGUNJIWO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNJIWO,

- Menimbang : a. bahwa Pungutan Kalurahan adalah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Kalurahan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo tentang Pungutan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82 );
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 83);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128).
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2020 Nomor 129);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2020 Nomor 134);
26. Peraturan Desa Bangunjiwo 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangunjiwo No 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);
27. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 05);

28. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 07);
29. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 08);
30. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keraja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 09);
31. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO

dan

LURAH BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO TENTANG  
PUNGUTAN KALURAHAN BANGUNJIWO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bangunjiwo
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Bangunjiwo dibantu Pamong Kalurahan Bangunjiwo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

4. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan
5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Bangunjiwo
6. Sekretariat Kalurahan adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Bangunjiwo
8. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan Bangunjiwo yang merupakan lingkungan kerja Lurah dipimpin oleh Dukuh.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunjiwo.
11. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Staf adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang terdiri dari Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.
13. Staf Kalurahan adalah staf Kalurahan Bangunjiwo
14. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan Bangunjiwo
16. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
17. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
18. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan Bangunjiwo yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
19. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan Bangunjiwo yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh melalui atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.

20. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *Anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, *Pelungguh*, *Pengarem-arem* dan tanah untuk kepentingan umum.

## **BAB II**

### **OBJEK PUNGUTAN KALURAHAN**

#### **Pasal 2**

Obyek Pungutan Kalurahan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan untuk :

A. Penyewaan Gedung Serbaguna :

1. Pemakaian rutin (untuk kegiatan olah raga)
2. Pemakaian tidak rutin
  - a. Untuk kegiatan / acara bagi Sekolah SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi per hari (di luar wilayah Kalurahan Bangunjiwo);
  - b. Untuk kegiatan / acara bagi TK dan SD (di luar wilayah Kalurahan Bangunjiwo);
  - c. Untuk kegiatan Dinas / Instansi / Lembaga;
  - d. Untuk Hajatan;

B. Penyewaan Kios Kalurahan :

1. Kios di Gendeng/Utara Puskesmas Kasihan I
2. Kios di Gendeng
3. Kios di Kalirandu/Pasar Asriharjo
4. Kios di Ngentak
5. Kios di Kasongan

C. Penyewaan Tanah Kalurahan:

1. Untuk Pertanian
2. Untuk non Pertanian

### **BAB III**

#### **WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN**

##### **Pasal 3**

Wajib Pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan /lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan Kalurahan karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan;

### **BAB IV**

#### **BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN**

##### **Pasal 4**

Besaran Pungutan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN**

##### **Pasal 5**

Seluruh hasil penerimaan Pungutan Kalurahan di setor ke Kas Kalurahan dan di kelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### **BAB VI**

#### **PELAKSANAAN PUNGUTAN**

##### **Pasal 6**

1. Pelaksanaan pungutan Kalurahan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Aset Kalurahan.
2. Tim Pengelola Aset Kalurahan dibentuk dengan Surat Keputusan Lurah Bangunjiwo.
3. Pelaksanaan pungutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bangunjiwo.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
pada tanggal 8 April 2021  
LURAH BANGUNJIWO

ttd

P A R J A

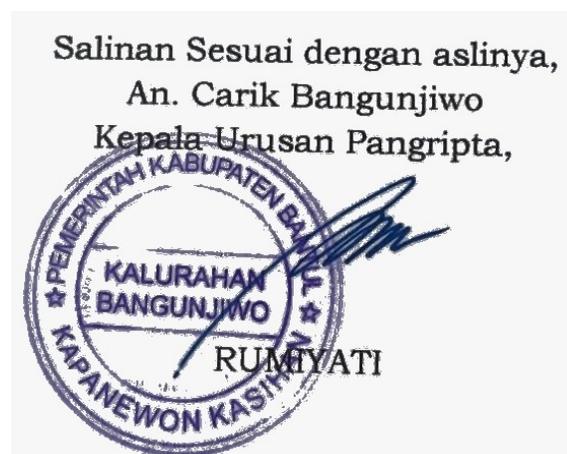
Diundangkan di Bangunjiwo  
pada tanggal 8 April 2021  
CARIK BANGUNJIWO

ttd

SUKARMAN

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 4

Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan  
Kabupaten Bantul : (10/Bangunjiwo/2021)



LAMPIRAN  
PERATURAN  
BANGUNJIWO  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PUNGUTAN  
BANGUNJIWO

KALURAHAN  
KALURAHAN

**BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN**

| NO       | JENIS PELAYANAN                                      | BESARNYA<br>PUNGUTAN<br>KALURAHAN<br>(Rp) | KETERANGAN  |
|----------|--|---|---|
| <b>I</b> | <b>PENYEWAAN GEDUNG SERBAGUNA DAN KIOS KALURAHAN</b> |   |   |
| <b>A</b> | <b>MASYARAKAT BANGUNJIWO</b>                         |   |   |
| 1.       | Penyewaan Gedung Serbaguna                           |   |   |
|          | a. Untuk Olah Raga                                   | 25.000                                    | Sekali pakai<br>(selama 5 Jam)  |
|          | b. Untuk Hajatan                                     |   |   |
|          | - Paket I  | 1.250.000                                 | Fasilitas :<br>Gedung<br>Kursi 100 bh<br>Kipas besar 2<br>bh                |
|          | - Paket II   | 1.500.000                                 | Fasilitas :<br>Gedung<br>Kursi 100 bh<br>Kipas besar 2<br>bh<br>Soundsistem |
| 2.       | Penyewaan Kios Kalurahan                             |   |   |
|          | a. Kios di Gendeng (Utara Puskesmas Kasihan I)       |   |   |
|          | - Kios I   | 7.000.000                                 | 1 tahun   |
|          | - Kios II  | 6.000.000                                 | 1 tahun   |
|          | - Kios III   | 5.000.000                                 | 1 tahun   |
|          | - Kios IV  | 5.000.000                                 | 1 tahun   |
|          | b. Kios di Gendeng                                   | 6.000.000                                 | 1 tahun   |
|          | c. Kios di Kalirandu                                 |   |   |
|          | - Kios I   | 7.000.000                                 | 1 tahun   |
|          | - Kios II  | 7.000.000                                 | 1 tahun   |
|          | - Kios III   | 7.000.000                                 | 1 tahun   |
|          | - Kios IV  | 7.000.000                                 | 1 tahun   |
|          | d. Kios di Ngentak                                   |   |   |
|          | - Kios I   | 8.000.000                                 | 1 tahun   |
|          | - Kios II  | 8.000.000                                 | 1 tahun   |
|          | e. Kios di Kasongan                                  | 7.000.000                                 | 1 tahun   |
| <b>B</b> | <b>MASYARAKAT LUAR BANGUNJIWO</b>                    |   |   |
| 1.       | Penyewaan Gedung Serbaguna                           |   |   |
|          | a. Untuk Olah Raga                                   | 30.000                                    | Sekali pakai<br>(selama 5 Jam)  |
|          | b. Untuk Hajatan                                     |   |   |
|          | - Paket I  | 1.750.000                                 | Fasilitas :   |

|  |           |   |  |   |
|--|-----------|---|--|---|
|  |           |   |  | Gedung<br>Kursi 100 bh<br>Kipas besar 2<br>bh                               |
|  |           | - Paket II  | 2.000.000                                    | Fasilitas :<br>Gedung<br>Kursi 100 bh<br>Kipas besar 2<br>bh<br>Soundsistem |
|  |           | c. Untuk Kegiatan<br>Dinas/Instansi/Lembaga/organisasi  | 500.000                                      | Fasilitas :<br>Gedung<br>Kursi 100 bh<br>Kipas besar 2<br>bh<br>Soundsistem |
|  | 2.        | Penyewaan Kios Kalurahan  |  |   |
|  |           | a. Kios di Gendeng (Utara Puskesmas<br>Kasih I)   |  |   |
|  |           | - Kios I  | 8.000.000                                    | 1 tahun   |
|  |           | - Kios II   | 7.000.000                                    | 1 tahun   |
|  |           | - Kios III  | 6.000.000                                    | 1 tahun   |
|  |           | - Kios IV   | 6.000.000                                    | 1 tahun   |
|  |           | b. Kios di Gendeng  | 7.000.000                                    | 1 tahun   |
|  |           | c. Kios di Kalirandu  |  |   |
|  |           | - Kios I  | 8.000.000                                    | 1 tahun   |
|  |           | - Kios II   | 8.000.000                                    | 1 tahun   |
|  |           | - Kios III  | 8.000.000                                    | 1 tahun   |
|  |           | - Kios IV   | 8.000.000                                    | 1 tahun   |
|  |           | d. Kios di Ngentak  |  |   |
|  |           | - Kios I  | 9.000.000                                    | 1 tahun   |
|  |           | - Kios II   | 9.000.000                                    | 1 tahun   |
|  |           | e. Kios di Kasongan   | 8.000.000                                    | 1 tahun   |
|  | <b>II</b> | <b>PENYEWAAN TANAH KALURAHAN</b>  |  |   |
|  | 1.        | Kalangan,<br>Hak Pakai No. 00166 luas : 1.280 M2<br>Hak Pakai No. 00205 luas : 359 M2   | 6.400.000                                    | 1 tahun<br>pertama  |
|  | 2.        | Bangen,<br>Hak Pakai No. 00238 luas : 1.598 M2<br>Hak Pakai No. 00237 luas : 1.499 M2<br>Hak Pakai No. 00097 luas : 8.117 M2<br>Hak Pakai No. 00179 luas : 2.741 M2   | 399.500<br>362.250<br>2.029.250<br>685.250   | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun                                    |
|  | 3.        | Bibis,<br>Hak Pakai No. 00153 luas : 5.705 M2   | 5.134.500                                    | 1 tahun   |
|  | 4.        | Donotirto,<br>Hak Pakai No. 00217 luas : 11.965 M2<br>Hak Pakai No. 00180 luas : 631 M2<br>Hak Pakai No. 00204 luas : 1.024 M2<br>Hak Pakai No. 00219 luas : 5.256 M2 | 2.393.000<br>126.200<br>204.800<br>1.051.200 | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun                                    |
|  | 5.        | Lemahdadi,<br>Hak Pakai No. 00110 luas : 4.297 M2<br>Hak Pakai No. 00111 luas : 11.320 M2<br>Hak Pakai No. 00114 luas : 4.043 M2                                      | 644.550<br>1.698.000<br>606.450              | 1 tahun<br>1 tahun<br>1 tahun   |
|  | 6.        | Lemahdadi,<br>Hak Pakai No. 00093 luas : 4.690 M2   | 703.500                                      | 1 tahun   |

|     |  |                        |                    |
|-----|--|------------------------|--------------------|
| 7.  | Gendeng,<br>Hak Pakai No. 00232 luas : 2.800 M2  | 560.000                | 1 tahun            |
| 8.  | Sribitan,<br>Hak Pakai No. 00148 luas : 5.000 M2                                       | 500.000                | 1 tahun            |
| 9.  | Salakan,<br>Hak Pakai No. 00089 luas : 2.092 M2  | 1.046.000              | 1 tahun            |
| 10. | Sambikerep,<br>Hak Pakai No. 00091 luas : 4.650 M2                                     | 2.325.000              | 1 tahun            |
| 11. | Gendeng,<br>Hak Pakai No. 00241 luas : 5.819 M2<br>Hak Pakai No. 00240 luas : 2.507 M2 | 2.909.500<br>1.253.500 | 1 tahun<br>1 tahun |
| 12. | Bangen,<br>Hak Pakai No. 00231 luas : 1.605 M2   | 722.250                | 1 tahun            |
| 13. | Lemahdadi,<br>Hak Pakai No. 00125 luas : 5.969 M2                                      | 1.492.250              | 1 tahun            |
| 14. | Kenalan,<br>Hak Pakai No. 00144 luas : 4.872 M2  | 730.800                | 1 tahun            |

Catatan :

1. Pemakaian rutin, tidak dapat menggunakan Gedung apabila Gedung sedang dipakai kegiatan lain.

LURAH BANGUNJIWO,

ttd

**P A R J A**